

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan yaitu sikap dari seorang pemimpin untuk dapat meyakini orang lain, anggota maupun kelompok serta mengatur tingkahlaku dari kelompok yang di pimpin. Kepemimpinan identik dengan pemimpin, gaya kepemimpinan dan lain sebagainya. Pemimpin mempunyai cara yang khas yang sesuai dan di inginkan oleh kelompoknya untuk memperoleh tujuan yang di inginkan kelompoknya. Yang perlu digarisbawahi dalam kepemimpinan ini adalah seni untuk dapat mengatur orang banyak supaya mampu sama-sama kolaborasi yang didasakan pada kekuatan seorang pemimpin untuk mengarahkan anggotanya untuk dapat memperoleh tujuan yang di inginkan oleh organisasi yang di pimpin nya. Namun, seorang pemimpin juga harus menunjukkan penguasaan yang memang berdasar atas kemampuan dari pribadi yang mampu mengundang orang lain untuk mampu melakukan hal-hal penting yang memang di setuju atau diketahui oleh kelompoknya, serta harus memegang kepiawaian pada situasi tertentu.

Sedangkan Wendy Sepmady Hutahaean (2021, hlm.2) mengemukakan pendapatnya bahwasanya Pemimpin tersendiri yakni penanggung jawab untuk berlangsungnya organisasi dan bertindak untuk mengarahkan, membimbing manajemen, memotivasi dan membangun komunikasi. Sedangkan Gaya Kepemimpinan merupakan kultur, watak, sikap dan kepribadian yang menjadi ciri khas dan unik dari seorang pemimpin yang dapat membedakannya dengan orang lain, sehingga mewarnai perilaku dan cara ia memimpin.

Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Fungsi dari seorang Pemimpin itu adalah harus mampu untuk mempengaruhi orang lain, aktivitas kelompok yang terstruktur saat upaya memperoleh satu tujuan yang di inginkan bersama sama.

Sedangkan dalam sifat kepemimpinan ini adalah sifat yang ada secara lahiriah dalam diri manusia.

Kemudian, Menurut Wendy Sepmady Hutahaean (2021,hlm.6) mengemukakan bahwasannya Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang sudah ada dalam diri seorang pemimpin yang di pengaruhi beberapa faktor, baik faktor *intern* maupun *ekstern*. Sikap kepemimpinan pula merupakan keahlian seorang pemimpin dalam mempengaruhi tingkah laku seseorang, baik yang memiliki kedudukan tinggi ataupun rendah daripadanya ketika berpikir dan bertindak sehingga tingkah laku yang awalnya memungkinkan seseorang individualistik serta egosentrik akan bertransformasi menjadi tingkah laku yang organisasional. Selain itu beliau pun mengemukakan bahwa seseorang yang menjadi seorang pemimpin mesti mempunyai segenap kelebihan, diantaranya :

1. Kapasitas
2. Prestasi
3. Tanggung Jawab
4. Partisipasi
5. Status

Kepemimpinan merupakan kekuatan seseorang untuk mampu menundukan memimpin orang lain yang memang berbeda karakter untuk dapat memperoleh tujuan tertentu. Bisa disimpulkan, kepemimpinan yaitu sifat yang mesti ada dalam diri seorang pemimpin yang memang implementasinya terdapat akibat dalam diri seorang pemimpin. Wendy Sepmady Hutahean (2021,hlm.3-4) mengatakan dalam bukunya bahwasannya seseorang yang menjadi seorang pemimpin haruslah mampu untuk berani secara tegas dan tepat untuk mengambil sebuah keputusan, menerima resiko tersendiri, serta seorang pemimpin hendaklah berani menanggung tanggung jawab sendiri diatas tanggung jawab seorang anggota yang lain.

Sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi diatas, bahwasanya ciri khas dari kepemimpinan itu merupakan kesederhanaan yang memang ciri khas dari seorang pemimpin, yang mampu menyendirikan dengan pemimpin yang lain, Kemudian

terdapat cara sia memimpin karena seorang pemimpin mempunyai karakter dan gaya kepemimpinan yang berbeda.

Sedangkan dari gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin yang lain, seorang pemimpin perempuan memperhatikan mempunyai ciri khas dalam memimpin yang demokratis dan memang *partisipatif* . Bisa dilihat dari gaya seorang pemimpin perempuan yang lemah lembut, perhatian kepada orang lain, hormat dan lain sebagainya, meskipun tidak menutup kemungkinan seorang pemimpin laki-laki yang lain pun akan berlaku demikian namun pemimpin laki-laki cenderung menjadi seorang pemimpin yang berperhatian agresif dan biasanya memakai sistem otoritas yang ia punya untuk melaksanakannya kontrol hingga komando.

B. Kajian Teori Politik

Miriam Budiarto (2008, hlm.13) mengatakan dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* bahwasanya Ilmu politik itu ilmu yang konsen dalam mengkaji ilmu-ilmu tentang politik yang memang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pencapaian tujuan untuk masyarakat yang makmur, dan sejahtera.

Karena politik itu haruslah mampu mempengaruhi orang lain, kehidupan orang banyak dan pengetahuan dari kajian mengenai perpolitikan salah satunya itu kunci untuk dapat mengerti lingkungan sekitar. Yusa Djuyandi (2014,hlm.7) dalam bukunya *Pengantar Ilmu Politik* mengemukakan bahwasannya pembahasan politik itu dapat dilepaskan dari adanya peranan sebuah negara yakni mengandung beberapa manusia yang saling berkolaborasi sama sama untuk menggapai tujuan organisasi yakni untuk menggapai masyarakat yang makmur, tentram, aman, dan sejahtera.

Dapat disimpulkan, bahwasannya kajian politik ini merupakan kajian yang memang mengkaji mengenai sebuah Negara, bagaimana tatanegara ini mampu mengatur masyarakat serta melaksanakan kolaborasi kerjasama dengan negara lainnya demi menggapai tujuan yang selaras. Keberadaan kajian ini pula memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, sebab dengan demikian akan mempermudah manusia untuk memahami gejala-gejala politik yang terjadi dan membuat sebuah penelitian

dalam rangka menemukan penemuan baru dalam menghadapi perkembangan dinamika kehidupan berpolitik. Keberadaan ilmu politik ini sebagai suatu ilmu pengetahuan dapat memberikan banyak manfaat untuk kehidupan manusia, sebab akan mempermudah manusia untuk memahami gejala-gejala politik yang terjadi dan membuat sebuah penelitian dalam rangka menemukan penemuan baru dalam menghadapi perkembangan dinamika kehidupan berpolitik. Mempelajari dari ilmu politik juga tidak hanya bermnafaat bagi kita, akan tetapi bermanfaat bagi bangsa dan negara secara keseluruhan karena pada dasarnya, politik berbicara mengenai kepentingan bersama yang harus sama-sama di perjuangkan melalui sebuah negara.

C. Kajian Teori Perempuan

Menurut Pedoman Dasar Kohati (2018-2020: hlm.74) Perempuan Secara Epistemologi berasal dari kata per-empu-an yang artinya nya itu mampu, jadi dapat disimpulkan bahwasanya seorang perempuan itu adalah seseorang yang mampu memenuhi sesuatu. Perempuan berasal sejak ada bahasa Jawa yakni “wani ditata” yang dapat diartikan sebagai orang yang dapat diurutkan atau diatur. Namun, ada juga yang mengatakan di nusantara yang berasal dari kata “wan” dan “ita” bahasa Sansekerta. Dengan demikian diartikan secara ontologi bahwasanya seorang perempuan adalah seseorang makhluk ciptaan Allah SWT yang memang diciptakan memiliki organ reproduksi seperti Vagina, Payudara, kelenjar susu dan juga rahim serta merasakan menstruasi, hamil hingga melahirkan dan menyusui. Sedangkan menurut aksiologi, perempuan adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai sifat rasa melindungi teruntuk yang tinggal di bumi. Namun, yang menjadi ciri khas dari seorang perempuan yakni seorang perempuan itu memiliki sifat yang memang ada dalam dirinya dan tidak dimiliki oleh seorang laki-laki yaitu sifat ke Ibu-an yang memang tertanam, dan ada dalam dirinya.

Banyak sekali program-program yang memang di buat oleh pemerintah demi memberdayakan seorang perempuan untuk membuat perempuan tersadar akan perannya serta tersadar akan kesetaraan gender yang ada untuk bisa mengembangkan serta memperluas potensi-potensi sehingga nantinya seorang perempuan bisa menjadi

seseorang yang memang mampu berdiri sendiri atas kakinya dan juga dapat ikut serta dalam pembangunan negara ini. Adapun tujuan –tujuan dari program pembangunan Pemberdayaan dari perempuan itu untuk perempuan mampu untuk mengasah serta melatih softskill kemampuan dari perempuan untuk dapat mengikut sertakan dirinya menjadi bermanfaat dalam pembangunan negara kedepan, lalu juga dapat memperbaiki kemampuan seorang perempuan dalam hal kepemimpinan, jiwa *leadership* dan melibatkan perempuan-perempuan dalam setiap pembangunan negara. Tidak hanya hal pembangunan Negara yang memang melibatkan kaum perempuan, tapi dalam pemberdayaan perempuan juga bertujuan untuk meningkatkan dari kemampuan serta peran dan fungsi dan perempuan sendiri sebagai wadah untuk perempuan-perempuan yang lain agar mampu dan bisa ikut andil dalam program pembangunan Negara serta peningkatan dari hidupnya sendiri seperti dalam mengelola usaha menengah kecil masyarakat dan lain sebagainya. Serta untuk membangun eksistensi, relasi, dan memotivasi perempuan-perempuan yang lain bahwasanya seorang perempuan pun memiliki hak yang setara dengan laki-laki, tidak selalu perempuan di posisikan di posisi kedua karena perempuan pun mampu melakoni bidang yang sama serta untuk menyadarkan kepada perempuan-perempuan yang lain mengenai kedudukan seorang perempuan dalam arah domestik dan juga arah yang lain.

Sedangkan menurut (Kiftiyah, 2019) ada dari sekian banyaknya program yang mampu memperdayakan perempuan, yakni :

1. Diasah kembali lembaga keperempuanan di segala sektor, mulai dari yang terkecil hingga kepada yang terluas. Dari ibu-ibu PKK yang ada di RT, perdesaan hingga kepada lembaga terluas dan terbesar sektornya dan diawasi serta ditingkat peran dan fungsi dari lembaga tersebut dengan seberjalannya waktu.
2. Meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam hal kepemimpinan, karena seorang perempuan pun mampu menjadi seorang pemimpin dengan posisi yang memang setara dengan laki laki terkait dengan peluang yang dapat dilibatkan dalam pembangunan Negara.

3. Lebih meningkatkan kembali kemampuan serta pengetahuan dari perempuan, baik individu maupun perlembaga untuk bidang keterampilan yang memang dapat menggiring kepada kemampuan serta penghasilan yang lain.

D. Kajian Teori Kepemimpinan Perempuan

Perempuan memang selalu menjadi seorang pemimpin, untuk dirinya sendiri. Bagaimana seorang perempuan mampu meningkatkan kompetensinya serta kapasitasnya agar mampu berdaya saing sehingga perempuan dianggap panas dalam budaya yang memang masih kental dengan kultur patriarki di Indonesia. Memimpin diri sendiri ini memang lebih sukit karena selalu membutuhkan keyakinan dan raya percaya bahwasanya semua hal bisa dicapai asalkan kita memang konsisten dalam menjalankannya. Ketika sudah memantaskan diri, tentunya menjadi seorang pemimpin dalam pekerjaan terutama dalam hal perpolitikan akan jauh lebih bisa dipertanggung jawabkan kualitas nya. Menurut Mubha Kahar Muang: 2008 dalam bukunya yang berjudul Perempuan, politik, dan kepemimpinan dijelaskan bahwasanya seorang perempuan yang memang ada di dalam titik puncak cenderung memimpin dengan ciri khas. Karena seorang pemimpin perempuan baik dimanapun seorang perempuan itu berada akan dipandang berbeda dengan seorang pemimpin laki-laki yang memang biasa menjadi seorang pemimpin dalam hasil yang memang sudah ia capai selama ia menjabat menjadi seorang pemimpin. Ketika seorang perempuan berada dalam struktur kepemimpinan maka lapisan tantangan yang ia hadapi akan terasa jauh lebih berat.

1. Pandangan Islam dalam memandang Perempuan menjadi seorang pemimpin

Ajaran islam tidak pernah membatasi jikalau seorang perempuan menjadi seorang pemimpin meskipun demikian, perempuan menjadi seorang pemimpin dikalangan islam jumlahnya masih sangat terbatas. Yang menjadi faktor dalam hal ini adalah terhambatnya potensi dari kepemimpinan perempuan salah satunya adalah salah kaprah dalam memahami ajaran Islam. Tantangan terberatnya adalah pandangan-pandangan masyarakat terkait dengan seorang perempuan yang menjadi seorang

pemimpin dengan adanya budaya patriarki. Padahal seorang perempuan pun mampu setara dengan seorang laki-laki dan perempuan pun memiliki kemampuan serta kompetensi yang sama dalam hal memimpin.

Memang, jika kita berbicara mengenai perpolitikan, perempuan dalam islam itu berarti berbicara mengenai peran seorang perempuan menjadi salah satu bagian dari masyarakat. Sedang dalam islam sendiri memandang seorang perempuan menjadi bagian dari masyarakat yang mempunyai kewajiban setara dengan laki-laki demi untuk kembali membangunkan masyarakat yang lain yang memang belum melek terhadap politik bagi masyarakat secara umum. Menurut islam tidak ada yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan yang membedakan hanyalah amal dan ibadahnya ia kelak. Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berisi mengenai tidak ada yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai Manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah yang maha mengetahui dan meneliti.

Sudah jelas dijelaskan bahwasanya Allah menuliskan sebagaimana firmannya bahwa kegiatan seorang perempuan itu mempunyai kedudukan yang memang berkaitan dengan individu manusia yang lain. Dalam sejarah islam disebutkan bahwa perempuan yang memang ada dalam permasalahan masyarakat. Diantaranya istri-istri Nabi. Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, anak nabi, cucu nabi serta cicit nabi adalah tokoh islam perempuan yang memang cerdas. Perempuan sebagai partisipan yang memang juga muncul serta diperhitungkan untuk loyalitas serta kesetiaan kepada pemerintah.

Tidak hanya itu juga, ada seorang perempuan yang cerdas, terpercaya dan hakim perempuan yang sangat terkenal pada masa pemerintahan al Muqtadir itu adalah seorang perempuan yang bernama Al-Syifa yang beliau itu diangkat oleh Umar bin Khattab.

2. Perempuan dan Pemimpin

Kepemimpinan merupakan sifat dan ilmu serta seni dalam hal memimpin. Ilmu yang memang di buktikan serta di implementasikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, Sedangkan yang dimaksud kepemimpinan itu adalah seni karena dalam kepemimpinan menunjukkan sifat dan gaya yang ciri khas yang memang berbeda dengan pemimpin yang lain. Baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu tidak harus dari seorang laki-laki, namun seorang perempuan pun mampu menjadi seorang pemimpin.

Perbedaan-perbedaan gaya kepemimpinan yang memang mempengaruhi pola kepemimpinan seorang pemimpin. Perempuan itu lebih cenderung memimpin dengan gaya yang berbeda dengan seorang laki-laki. Namun pemimpin perempuan sama hebatnya dengan seorang pemimpin laki-laki. Dikatakan hebat karena dia sudah berani menjadi seorang pemimpin dengan menerima resiko lebih besar dari yang lainnya.

Pemimpin itu akan jauh lebih dihargai oleh masyarakat atau anggota yang memang ia pimpin. Terlebih lagi mengenai kewibawaannya ketika ia menjadi seorang pemimpin. Ada 4 (empat) Peran perempuan yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang perempuan. Pertama, peran dia sebagai seorang anak yang memang di haruskan untuk menjalankan serta mematuhi dan berbakti kepada kedua orang tua. Kedua, peran dia sebagai seorang Istri yang dimana peran perempuan sebagai seorang istri yang sholehah serta berbakti dan patuh kepada seorang suami. Berikutnya, peran seorang perempuan sebagai seorang Ibu yang memang perempuan menjalankan fitrahnya menjadi seorang Perempuan dengan mengandung, melahirkan dan menyusui hingga membesarkan anak untuk kelak menjadi harapannya. Dan yang terakhir peran perempuan sebagai anggota masyarakat, dimana perempuan menjadi ujung tombak hadirnya perempuan dinilai

harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai keperempuanan dan anak dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat.

F. Kajian Teori Politik dan Perempuan

Perempuan sekarang banyak yang ikut berpartisipasi di dalam perpolitikan, namun dalam partisipasinya perempuan itu tidak selalu mulus karena sering kali juga dihadapkan dengan tantangan dan rintangan yang memang salah satunya kentalnya budaya patriarki. Pun juga dengan keterwakilan perempuan dalam legislatif juga dikarenakan adanya budaya patriarki yang memang sangat kental dalam masyarakat. Budaya patriarki ini juga yang selalu memposisikan seorang perempuan diposisi kedua setelah laki-laki yang selalu beranggapan bahwasannya politik itu erat kaitannya dengan seorang laki-laki karena politik itu dipandang sebagai dunia public, dunia yang bebas yang biasanya hanya dihuni oleh laki-laki saja. Pandangan ini yang justru menyudukan posisi seorang perempuan ada dalam posisi kedua setelah laki-laki.

Masih banyaknya ketidak setaraan gender, perempuan dianggap tidak mampu terjun dan menyelesaikan persoalan-persoalan politik padahal perempuan pun dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Negara ini terkhusus perempuan mampu dilibatkan dalam pembangunan Negara ini. Banyak yang beranggapan seorang perempuan itu tak pantas masuk kedalam dunia politik karena perempuan harus menjalankan peran domestiknya sebagai seorang anak, istri, dan juga seorang ibu. Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang memang saling berhubungan dengan peran perempuan dalam pemerintahan atau dalam politik.

Pemerintah seharusnya membuat regulasi atau peraturan dari kebijakan yang baru yang mampu menyelaraskan dengan peraturan kuota 30% representative perempuan karena perempuan pun mempunyai hak dan kewajiban yang setara dengan seorang laki-laki. Adanya pandangan seorang perempuan yang selalu di posisikan setelah laki-laki ini menghambat kemajuan dari perempuan itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya budaya patriarki yang masih sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat.

Kuota 30% mengenai representasi perempuan dalam setiap partai politik yang ada itu membuat lebih banyak peluang yang ada bagi perempuan untuk dapat terjun ke dunia politik. Hal ini diatur dalam UU Pemilu, namun implementasi yang didapatkan tidak mudah bagi seorang perempuan untuk dapat menggeluti dunia perpolitikan karena dengan banyaknya rintangan dan tantangan yang memang harus di jalani oleh seorang perempuan/. Tidak sedikit dari partai politik ini mampu memberikan peluang bagi perempuan hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban saja mengenai representasi 30%.

Disamping issue perempuan yang ada, secara normatid biasanya para perempuan yang akan maju dan terlibat dalam partai politik itu diusung melalui partai politik sebagai bagian dari infastruktur politik yang memang mempunyai tugas atau fungsi sebagai pelaksana pendidikan politik, meningkatkan partisipasi politik, requitment politik, pemandu kepentingan, mencari serta mempertahankan kekuasaan, komunikasipolitik, pengendali konflik, pembuat keputusan politik, dan juga control politik.

Tabel 2.1. Anggota DPR Terpilih pada setiap Fraksi Periode 2014-2019 Berdasarkan Jenis Kelamin

Partai	Jumlah Kursi	Jenis Kelamin			
		Laki-Laki	%	Perempuan	%
Nasdem	35	31	88,57	4	11,43
PKB	47	37	78,72	10	21,28
PKS	40	39	97,50	1	2,50
PDIP	109	88	80,73	21	19,27
Golkar	91	75	82,42	16	17,58
Gerindra	73	62	84,93	11	15,07
Demokrat	61	48	78,69	13	21,31
PAN	49	40	81,63	9	18,37

PPP	39	29	74,36	10	25,64
Hanura	16	14	87,50	2	12,50
Total	560	463	82,68	97	17,32

Sumber : Diolah dari KPU, Statistik Politik 2016, Badan Pusat Statistik (BPS)

Dalam tabel di atas, yang mendeskripsikan ihwal jumlah anggota dewan yang berasal dari gender berbeda. Pada pemilihan umum tahun 2014-2019, representasi perempuan dalam lembaga legislative di Indonesia masih sangat minim.

Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang memang saling berhubungan dengan peran perempuan dalam pemerintahan atau dalam politik. Seharusnya pemerintah mampu memproduksi regulasi baru yang mampu membersamai mengenai keberadaan kuota 30% dari representasi keberadaan perempuan di Partai politik. Pun tidak hanya itu, perempuan harus bisa mengawasi mengenai kebijakan kebijakan yang sudah mereka buat. Karena pada kenyataannya, seorang perempuan pun mampu bersaing dengan seorang laki-laki yang sama-sama mempunyai keterampilan, pengetahuan yang tidak kalah baiknya dengan laki-laki. Ketika hal itu sudah terjadi, perempuan diharapkan agar terus berpartisipasi dalam keberadaan dirinya dalam organisasi partai politik itu dengan selalu meng*upgrade* dirinya menjadi jauh lebih matang kompetensinya, kapasitasnya kualifikasinya sebagai seorang warga Negara yang setara dengan laki-laki.

Peningkatan dari keterwakilan perempuan inilah yang selalu di usahakan oleh pemerintah dengan memberikan ketentuan kepada partai politik dengan mempertimbangkan keterwakilan dari perempuan itu sendiri. Peningkatan keterwakilan perempuan inilah yang memang terus meningkat terus menerus dengan mewujudkan hak dari tiap orang untuk mendapat posisi yang setara.

Peningkatan ini terjadi karena berlakunya perubahan dari UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwasanya setiap warga Negara itu berhak untuk memperoleh kemudahan, kesempatan serta manfaat yang setara untuk kesetaraan dan keadilan. Pun juga pada UU Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur mengenai syarat dari pendirian partai politik itu sendiri tertuang pada pasal 2 yang menyatakan "*Pendirian*

dan pembentukan partai politik ini harus menyertakan 30% dari keterwakilan perempuan” hal inilah yang seiring berjalannya waktu *affirmative action* kepada perempuan semakin membaik. Namun, masih banyaknya hambatan yang terjadi. Budaya patriarki yang masih kental ini lah yang selalu mendiskriminasi perempuan yang memang menjadi beban tersendiri bagi para perempuan diruang public dan banyaknya pandangan pandangan yang mendeskriminasikan bahwasanya pendidikan dan kemampuan dalam berpolitik perempuan masih dinilai masih belum sempurna dibandingkan dengan laki-laki. Representasi dari perempuan inilah yang memang masih kurang dalam lembaga legislatif, yang memang dapat disiasati dengan penguatan terus menerus untuk meningkatkan keterpilihan dari keterwakilan perempuan. UU Partai poltiik mengenai pemilu inilah yang menjadi salah satu dari sekian indicator yang terjadi mengenai kesetaraan gender ini. Keterwakilan perempuan inilah yang menjadi salah satu hal yang penting bagi kehidupan politik karena perempuan memberikan kontribusinya besar dalam pencapaian hak-hak yang ada dalam perempuan khususnya mengenai kesetaraan gender.

G. Kajian Peneliti Terdahulu

Kajian yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu kajian yang dilaksanakan oleh Annisa Fitriani (2015) dengan judul “Gaya kepemimpinan perempuan” yang menyatakan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan perempuan dengan gaya tertentu yang khas dengan perempuan. Selanjutnya yang di laksanakan oleh Nurlita Fadhilah Isnaini (2018) yang berjudul “Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut UU Nomoe 7 Tahun 2017 dengan presepektif Islam” yang menyatakan hasil penelitiannya bahwa kepemimpinan perempuan menurut UU nomoe 7 Tahun 2017 ini sesuai dengan prespektif kajian hukum islam yang sudah mengatur dengan jelas bahwasanya baik laki-laki maupun perempuan yang memimpin itu perempuan mampu mencalonkan menjadi seorang pemimpin dengan kualifikasi yang sama.

Persamaan penelitian yang ada yaitu sama-sama membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam politik sebesar 30%, pun juga untuk menjawab

pertanyaan selama ini jika perempuan diperbolehkan menjadi seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan dan ciri khas perempuan. Sedangkan perbedaan dalam riset ini yaitu kajian teori materi yang akan dibahas dan sasaran penelitian kepada mahasiswa atau *actor* politik terutama peran dari partai politik untuk mengedukasi perempuan. Maka dari itu, kajian ini penting untuk dibahas. Penjelasan tersebut sangat esensial bagi peneliti untuk melakukan riset dengan judul “Pengaruh Era Kepemimpinan Perempuan (*Women Leadership*) Sebagai *Role Model* Dalam Meningkatkan Keterlibatan Perempuan Pada Keikutsertaan Partai Politik” (Studi Kasus pada DPC Partai Demokrat Cimahi) .

H. Kerangka Pemikiran

Keterlibatan kaum perempuan dalam dunia politik, khususnya dalam setiap pemilihan umum yang sudah dilaksanakan selalu mengalami fluktuasi, peningkatan maupun penurunan. Hadirnya kebijakan afirmatif (*Affirmative action*) di tengah-tengah ketidakpastian masa depan dengan kesenjangan gender itu telah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi di setiap proses politik praktis melalui beragam cara. Namun, munculnya kesenjangan-kesenjangan diruang publik terutama bagi kaum perempuan salah satu diantaranya adalah kesenjangan akses, hak-hak mereka serta peranan perempuan dalam dunia politik maupun pemerintahan itu sendiri. Hal itu tercermin pada persoalan politik perempuan yang dimana persoalan politik perempuan di Indonesia ini karena masih adanya ketidakadilan gender dalam struktur dan budaya di Indonesia. Seperti contohnya ruang-ruang publik yang belum mampu melibatkan perempuan secara menyeluruh, maka dari itu harus adanya regulasi yang mengatur mengenai pemenuhan-pemenuhan hak hak dari perempuan dalam dunia politik serta pemerintahan agar dapat membawa angin segar bagi perkembangan demokrasi apalagi melibatkan dalam pembuatan kebijakan publik yang berbasis pada gender, dan perempuan.

Hal-hal yang merugikan hak konstitusional perempuan itu salah satunya adalah bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan yang merupakan tindakan-tindakan yang

muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seorang perempuan kerap ditempatkan dalam posisi cadangan atau *second line position* meski perempuan juga memiliki kualifikasi yang sama. Seolah-olah perempuan yang masuk dalam ranah politik dan pemerintahan hanya menjadi pemanis, pelengkap dalam keindahan di sistem politik dan pemerintahan. Seharusnya ada upaya-upaya yang menghapuskan segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam dominan politik itu yang saya amati dan lihat sekarang seolah-olah keterlibatannya dipaksakan. Artinya disini sistem kaderisasi dan pendidikan politik itu belum berjalan baik, oleh karena nya partai politik harus mampu mengartikulasikan perannya sebagai entitas sosial publik yang termanifestasi dalam bentuk peningkatan pemahaman warga terhadap persoalan politik, terutama kaum perempuan.

Jadi, Melihat kajian teori yang sudah dijelaskan tadi penulis mengambil point-point untuk menjadi bahan pada penelitian yakni,

1. Bagaimana pandangan perempuan terhadap fenomena politik yang terjadi di era dewasa sekarang, dan bagaimana pengaruh kepemimpinan perempuan dalam perpolitikan itu sendiri serta bagaimana pengaruh dari kepemimpinan perempuan dalam perpolitikan itu sendiri serta bagaimana cara perempuan memberdayakan hidupnya sebagai *role model* untuk menumbuhkan kepercayaan diri perempuan menjadi pemimpin.
2. Bagaimana wawasan seorang perempuan dalam memahami situasi dan kondisi politik yang terjadi baru-baru ini, apalagi melihat *role model* yang ada dapat memberikan contoh bahwa seorang perempuan pun mampu menjadi seorang pemimpin.
3. Bagaimana program-program pendidikan politik yang diluncurkan oleh partai politik kepada masyarakat khususnya kepada kaum perempuan supaya mereka melek terhadap politik, dan apa yang menjadi pengaruh di era kepemimpinan perempuan untuk menumbuhkan kepercayaan diri perempuan menjadi seorang pemimpin terlebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat mengenai kerwakilan perempuan di parlemen.

I. Hipotesis Penelitian

Menurut permasalahan dan kajian pembahasan teori yang sudah diungkapkan, dirumuskanlah hipotesis dalam penelitian sebagai berikut :

1. Adanya suatu perubahan dari paradigma berpikir perempuan terkait kontestasi politik yang semakin hari semakin dinamis dan melihat serta termotivasi dengan *role model* dalam kepemimpinan perempuan.
2. Terdapat suatu pemahaman lebih dari perempuan untuk mendalami suatu bidang atau kepemimpinan perempuan serta mampu mengaplikasikannya.
3. Terdapat suatu pemikiran bahwasanya perempuan sedikit banyaknya pasti terlebiat dalam keikutsertaan partai politik.